

Indeks Pembangunan Manusia dan Total Aset Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus 3 Provinsi)

Hurian Kamela¹, Thomson Sitompul², Erni Yulianti³, Devi Mulyanti⁴, Hendri Kartika Andri⁵

^{1,3,4,5}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora, Universitas Tangerang Raya

²Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Pelita Harapan

¹hurian.kamela@untara.ac.id (*)

Abstract— There is still limited research on the development of local government conditions, namely economic development in the province. The measurement of the economic condition of the community uses the Human Development Index (HDI) score from the Central Statistics Agency (BPS). The purpose of this study is to provide empirical evidence regarding the relationship between HDI, total assets and the economic condition of the community. The study was based on a sample of 69 cities and regencies in 3 provinces, namely Aceh, North Sumatra and West Sumatra. The reason this sample is studied is to provide a comparison of economic conditions that occurred in 2016. The research method uses regression. The dependent variable is Economic Condition. The independent variables are the Human Development Index (HDI) and total assets. The results of the study are (1) HDI does not affect the economic condition of the community, (2) Total assets have an effect on the economic condition of the community. These results provide an explanation that the Human Development Index (HDI) is not all related to the economic welfare of a region, when the HDI is high it means that the economic capacity is not necessarily considered to be improving, while the number of assets owned by the City/Regency affects the economic condition of the community. The research contribution is to provide empirical evidence that the economic condition of a region does not depend on the progress of the region, but in accordance with the welfare conditions of each region.

Keywords: Government, HDI, Assets..

Abstrak Abstrak— Masih terbatasnya penelitian mengenai perkembangan kondisi pemerintah daerah yaitu perkembangan ekonomi di wilayah Provinsi. Pengukuran kondisi ekonomi masyarakat menggunakan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Badan Pusat Statistika (BPS). Tujuan penelitian adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai keterkaitan HDI, total aset terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Penelitian berdasarkan sampel 69 Kota dan Kabupaten pada 3 Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Alasan sampel ini diteliti yaitu memberikan perbandingan kondisi ekonomi yang terjadi di tahun 2016. Metode penelitian menggunakan regresi. Variabel dependen yaitu Kondisi Ekonomi. Variabel independen adalah Human Development Index (HDI) dan total aset. Hasil penelitian yaitu (1) HDI tidak berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat, (2) Total aset berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Hasil ini memberikan penjelasan bahwa Human Development Index (HDI) tidak semuanya berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi dari suatu wilayah, saat HDI tinggi berarti belum tentu kemampuan ekonomi dianggap membaik, sedangkan jumlah aset yang dimiliki oleh Kota/ Kabupaten berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Kontribusi penelitian adalah memberikan bukti empiris bahwa keadaan ekonomi suatu wilayah tidak bergantung dengan kemajuan wilayah, tetapi sesuai dengan kondisi kesejahteraan wilayah masing-masing.

Kata kunci— Pemerintah, HDI, Aset.

I. PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi yang ada di tiap wilayah berbeda. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Budihardjo (2020) membahas tentang tenaga kerja, investasi dan IPM, hasil ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Jawa Tengah. Berdasarkan teori Neo-Klasik (Solow & Swan) menjelaskan adanya pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai penawaran. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan faktor-faktor produksi, berkaitan dengan level pertumbuhan modal dan perkembangan teknologi [1]. Modal ini merupakan modal yang sifatnya fisik misalnya barang modal serta investasi (Todaro & Smith, 2011) [6].

Setyawan & Arief (2019) menjelaskan peran internal dari pemerintah mengenai peningkatan IPM dipengaruhi dengan adanya realisasi APB. Pemerintah berperan khususnya dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah dan peraturan mengenai desentralisasi fiskal dengan adanya pertimbangan bahwa internal daerah yang mengetahui secara pasti mengenai

standarisasi pelaksanaan pelayanan khususnya masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih meningkat. Tujuan penelitian yaitu (1) untuk memberikan perbandingan mengenai IPM dan total aset, (2) untuk menjelaskan kondisi mengenai wilayah (Provinsi) yang berbeda dengan output hasil yang kuantitatif (angka). Kontribusi penelitian yaitu (1) memberikan analisis mengenai pentingnya keuangan pemerintahan daerah kepada masyarakat khususnya aset yang dimiliki oleh daerah, (2) memberikan pengukuran secara kuantitatif secara spesifik dengan membandingkan penelitian sebelumnya.

TINJAUAN LITERATUR

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Palayukan (2019) melakukan penelitian untuk IPM mengenai belanja pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sultra, hasilnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia harus ada peningkatan mengenai belanja khususnya sektor publik yakni belanja mengenai pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan supaya kualitas

menjadi lebih baik [2]. UNDP menjelaskan laporan tahunan mengenai *human development report* mengenai laporan tentang perkembangan pembangunan manusia. Indeks dari UNDP berasal dari 3 komponen utama (sub indeks) mengenai kualitas hidup manusia:

- Indeks kesehatan berdasarkan angka harapan hidup kelahiran.
- Indeks pendidikan berupa rata-rata tahun belajar dan harapan belajar.
- Pendapatan per kapita.

Sehingga hipotesis 1:

H1: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat.

Total Aset

Penelitian Seftianne (2011) menjelaskan tentang besar/kecilnya perusahaan berdasarkan lapangan usaha yang dijalankan. Skala penilaian besar kecilnya usaha menggunakan pengukuran total aset, total penjualan, dan rata-rata penjualan [3]. Wibowo & Purwaningsih (2019) menjelaskan APBD, opini audit, total aset, serta pelaksanaan latar belakang pendidikan terhadap *audit delay*. Hasilnya total aset dan latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap *audit delay* (penundaan audit). Selain itu, sumber daya yang berkaitan dengan entitas bahwa kegiatan operasional entitas disebut aset [7]. Besarnya jumlah aset menunjukkan besarnya sumber daya yang dapat dimanfaatkan mengenai pengungkapan yang lebih besar. Sehingga hipotesis 2:

H2: Total Aset berpengaruh terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat.

Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi bisa menggunakan pengukuran berdasarkan skor penduduk yang kurang sejahtera. Data ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016. Sidauruk (2013) menjelaskan bahwa kondisi ekonomi bergantung situasi infrastruktur Kabupaten/Kota masih berbeda di tiap wilayah. Adanya masalah mengenai permodalan khususnya bagi pihak pelaku usaha [5].

II. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu menggunakan regresi linier berganda. Data penelitian berdasarkan data sekunder yaitu data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016. Total sampel adalah 69 Kota/Kabupaten di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengolahan data menggunakan aplikasi stata.

Tabel
IPM Score

Var	IPM Score	Measurement
Aceh Barat	69.26	Used
Aceh Barat Daya	64.57	Used
Aceh Besar	71.75	Used

Aceh Jaya	67.7	Used
Aceh Selatan	64.13	Used
Aceh Singkil	66.96	Used
Aceh Tamiang	67.41	Used
Aceh Tengah	72.04	Used
Aceh Tenggara	67.48	Used
Aceh Timur	65.42	Used
Aceh Utara	67.19	Used
Bener Meriah	71.42	Used
Bireuen	70.21	Used
Gayo Lues	64.26	Used
Nagan Raya	67.32	Used
Pidie Jaya	71.13	Used
Simeulue	63.82	Used
Banda Aceh	83.73	Used
Langsa	75.41	Used
Lhokseumawe	75.78	Used
Sabang	73.36	Used
Subulussalam	62.18	Used
Pidie	69.06	Used
Asahan	68.71	Used
Batu Bara	66.69	Used
Dairi	69.61	Used
Deli Serdang	73.51	Used
Karo	73.29	Used
Labuhanbatu Selatan	70.28	Used
Labuanbatu Utara	70.26	Used
Langkat	69.13	Used
Nias	59.75	Used
Nias Barat	59.03	Used
Nias Selatan	59.14	Used
Padang Lawas	66.23	Used
Padang Lawas Utara	68.05	Used
Pakpak Bharat	65.81	Used
Samosir	68.82	Used
Serdang Bedagai	68.77	Used
Simalungun	71.48	Used
Tapanuli Selatan	68.04	Used
Tapanuli Tengah	67.27	Used
Tapanuli Utara	71.96	Used
Toba Samosir	73.61	Used
Binjai	74.11	Used
Gunungsitoli	66.85	Used
Medan	79.34	Used
Padangsidempuan	73.42	Used
Pematangsiantar	76.9	Used
Tebing Tinggi	73.58	Used
Agam	71.1	Used
Dharmas Raya	70.4	Used
Kepulauan Mentawai	59.25	Used
Limapuluh Koto	68.69	Used
Padang Pariaman	68.9	Used
Pasaman	64.94	Used
Pasaman Barat	66.83	Used
Pesisir Selatan	68.74	Used
Sawah Lunto/Sijunjung	66.6	Used
Solok	77.44	Used
Solok Selatan	67.81	Used
Tanah Datar	70.37	Used
Kota Bukit Tinggi	79.8	Used
Kota Padang	81.58	Used
Kota Padang Panjang	77.01	Used
Kota Pariaman	75.71	Used
Kota Payakumbuh	77.91	Used
Kota Sawah Lunto	71.13	Used
Kota Solok	77.44	Used

Sumber data diolah : 2022

Tabel 1 menjelaskan mengenai skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu skor mengenai kesejahteraan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Skor tertinggi adalah 79.34 (Medan) dan terendah adalah Nias Barat (59.03). Hasil ini menjelaskan bahwa Medan merupakan sampel penelitian sebagai Kota yang sejahtera dibandingkan dengan Kota/ Kabupaten lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

TABEL 2
STATISTIK DESKRIPTIF

Var					
	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
WTH	69	34.48275	33.42876	1.34	206.87
HDI	69	69.95478	5.186812	59.03	83.73
Ln_total asset	69	28.20129	.632434	25.57805	31.03084

Sumber data diolah : 2022

Tabel 2 menjelaskan jumlah dari observasi penelitian adalah 69. Mean tertinggi adalah HDI dengan skor 69.95478 dan terendah adalah Ln total asset yaitu 28.20129.

TABEL 3
REGRESI

Var.				
	Coef.	Std.Err	t	P>t
HDI	.2046996	.5349552	0.38	0.703
Ln_total asset	38.96393	4.387354	8.88	0.000
cons	-1078.67	128.4025	-8.40	0.000

Sumber data diolah : 2022

Tabel 3 menjelaskan hasil regresi yaitu H1 Human Development Indeks (HDI)/ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap kondisi masyarakat dengan skor 0.703 (tidak berpengaruh) karena nilai P>t lebih besar dari 0.05. Hasil ini menjelaskan (1) semakin besar IPM tidak memberikan pengaruh mengenai keberlangsungan kegiatan yang terjadi di masyarakat, (2) kondisi yang terjadi membuktikan bahwa kesejahteraan bukan diukur dari indeks tertentu, sehingga pengembangan ekonomi tergantung pada wilayah dan pendapatan per daerah. Sedangkan H2 yaitu total aset berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, hal ini berbeda dengan penelitian selanjutnya oleh Purwaningsih (2019). H2 yang berbeda dapat disebabkan (1) lokasi dan kondisi, karena sampel penelitian hanya terbatas di 3 Provinsi, (2) adanya faktor-faktor eksternal diluar keuangan, seperti keputusan pejabat publik dan lain-lain.

TABEL 4
SCORE

R-Square	0.5456
Adj R-Squared	0.5318
Prob > F	0.0000

Sumber data diolah : 2022

Tabel 4 menjelaskan hasil regresi yaitu nilai R-Square sebesar 0.5456. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai R-Square (variabel independen ke variabel dependen sebesar 54.56%) yaitu nilainya moderat karena masih dibawah 0.67. Sedangkan untuk adj R-Squared itu nilainya juga moderat sebesar 0.5318 yaitu 53.18%. Nilai Prob >F adalah 0.000 menyatakan signifikasinya bersifat stimultan dan dapat diuji.

TABEL 5
VIF

Var.	VIF
Mean VIF	1.00

Sumber data diolah : 2022

Tabel 5 menjelaskan hasil VIF tentang uji multikolinearitas bahwa nilainya 1.00. Skornya <10 berarti bebas multikolinearitas bahwa tidak terjadi error pada penelitian.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan pembahasan mengenai keterkaitan HDI, total aset terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Hasil ini memberikan penjelasan bahwa Human Development Index (HDI) tidak semuanya berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi dari suatu wilayah, saat HDI tinggi berarti belum tentu kemampuan ekonomi dianggap membaik, sedangkan jumlah aset yang dimiliki oleh Kota/ Kabupaten berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Kontribusi penelitian adalah memberikan bukti empiris bahwa keadaan ekonomi suatu wilayah tidak bergantung dengan kemajuan wilayah, tetapi sesuai dengan kondisi kesejahteraan wilayah masing-masing.

Implikasi penelitian ini : (1) Bagi Pemerintah, dapat melakukan pengelolaan pendanaan seperti aset bisa disalurkan secara optimal, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil ekonominya, (2) Bagi Peneliti, dapat meningkatkan penelitian yang berbasis pemerintahan dan laporan keuangan daerah. Keterbatasan penelitian ini yaitu menggunakan penelitian dengan waktu yang terbatas yaitu tahun 2016. Saran penelitian lanjutan dapat menambahkan sampel yang lebih luas misalnya menambah provinsi serta Kota/Kabupaten di Indonesia.

REFERENSI

- [1] Budihardjo et al. .2020. PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PDRB (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018). DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS. Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020. ISSN (Print) : 2337-3814. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- [2] Palayukan 2019. PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA: STUDI KASUS PROVINSI SULAWESI TENGGARA. Jurnal BPPK Volume 12 Nomor 2 Tahun 2019 Halaman 74-91.
- [3] Seftianne & Handayani. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 13(1), 39-56.

- [4] Setyawan & Arief. 2019. PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS 9 KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008 - 2017). *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Hal 907–918. Volume 4, Nomor 2, September 2019.
- [5] Sidauruk. 2013. PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Bina Praja* | Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2013: 141-158.
- [6] Todaro, Michael P and Smith, Stephen C. 2011. *Pembangunan Ekonomi 2*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [7] Wibowo & Purwaningsih. 2019. PENGARUH NILAI APBD, TOTAL ASET, OPINI AUDIT, DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN TERHADAP AUDIT DELAY PEMERINTAH DAERAH DI SUBOSUKOWONOSRATEN. *Media Akuntansi* : Vol. 93, No. 01 (Januari – Juni) 2019.